

Komunikasi Politik Era Susanto Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Pada Sisa Masa Jabatan 2021 – 2024

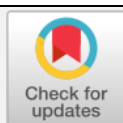
Elsa Madina¹ & Ibrahim²

^{1,2}Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

*Korespondensi : elsamadina31@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 10 Juli 2024;
Diterima: 12 Agustus 2024;
Dipublikasi: 21 Agustus 2024;



**Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by JSC**

***This is an open-access article.
License: Attribution-
NonCommercial-ShareAlike
(CC BY-NC-SA)***

How to cite:
**Madina, E., Ibrahim, Hidayat,
N. 2024. Komunikasi Politik
Era Susanto Dalam Pengisian
Kekosongan Jabatan Wakil
Bupati Kabupaten Bangka
Tengah Pada Sisa Masa
Jabatan 2021 – 2024.**

Journal of Social Contemplativa.
2(2); 92-108.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab keterlambatan pelantikan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah pada sisa masa jabatan 2021 – 2024. Keterlambatan pelantikan jabatan tersebut terjadi hingga hampir satu tahun sebelum terpilihnya Era Susanto pada tanggal 20 Maret 2023, namun baru resmi dilantik pada tanggal 6 November 2023. Peneliti menggunakan teori komunikasi politik Dan Nimmo dalam melihat bagaimana dinamika politik dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah serta pola komunikasi politik dan praktik politik yang dijalankan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah telah diupayakan oleh berbagai pihak, dengan menjalin komunikasi yang baik. Era Susanto membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat (Kemendagri), DPRD Kabupaten Bangka Tengah, partai politik dan *civil society* di Kabupaten Bangka Tengah. Namun dalam proses menuju pelantikannya terjadi problematika dimana, terdapat kekurangan pada salah satu berkas yang perlu dilengkapi, yakni surat rekomendasi dari DPP partai Golkar. Hal ini dianggap janggal dan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Meskipun penundaan pelantikan Era Susanto telah memakan waktu cukup lama, namun dengan berbagai upaya komunikasi politik dan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya Era Susanto resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021 – 2024.

Abstract *This study aims to analyze the causes of the postponement of the inauguration of the position of Deputy Regent of Central Bangka Regency for the remainder of the 2021 – 2024 term of office. The delay in inauguration of this position occurred almost a year before the election of Era Susanto on March 20, 2023,. He was only officially inaugurated on November 6, 2023. Dan Nimmo's theory of political communication analyzes this situation, scrutinizing the political dynamics involved in the appointment of a new Deputy Regent for Central Bangka Regency. It also explores the patterns of political communication and practices undertaken to achieve specific objectives. The research employed qualitative methods, utilizing data collection approaches such as interviews, documentation, and observation. The findings revealed that multiple entities, including political communicator Era Susanto, central government (Ministry of Home Affairs), parliament, political parties, and even civil society in Central Bangka*



Regency, have actively sought to fill the vacant position of Deputy Regent of Central Bangka Regency by establishing effective communication. However, in the lead-up to the inauguration, there is encountered a significant obstacle. It was determined that one of the files, specifically the recommendation letter from the Central Executive Board of the Golkar Party, had not been completed properly. The authorities deemed this to be unusual and not in compliance with the required regulations. Although the postponement of Era Susanto inauguration has taken quite a while, with various political communication efforts and pressure from various parties, Era Susanto was finally officially inaugurated as Deputy Regent of Central Bangka Regency for the remaining term of office in 2021-2024.

Kata Kunci: Komunikasi Politik; Kekosongan Jabatan; Jabatan Bupati Wakil Bupati

1. Pendahuluan

Kegagalan Komunikasi politik dalam pengisian kekosongan jabatan yang dialami Era Susanto selaku Pengganti Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih sisa masa jabatan 2021-2024 yang dalam proses pelantikannya harus melalui berbagai tantangan dan dinamika yang cukup rumit. Terpilih sejak tanggal 20 Maret 2023, namun baru resmi dilantik pada tanggal 6 November 2023. Keterlambatan ini tentunya dapat memicu adanya konflik serta ketidakpastian politik di Kabupaten Bangka Tengah, sebab kekosongan jabatan tersebut telah mengulur waktu hampir satu tahun lamanya, setelah Herry Erfian mantan Wakil Bupati sebelumnya mengundurkan diri karena harus menggantikan posisi Hudarni Rani anggota DPD RI yang meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat berhenti karena 3 (tiga) alasan yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan.

Saat pencalonan Era Susanto di usung oleh 1 (satu) partai yakni: PPP dengan perolehan 3 (tiga) kursi yang dimiliki oleh partai pendukung, sedangkan rivalnya Muhammad Irham diusung oleh 4 (empat) partai yaitu: Gerindra, PAN, PKS dan PKB, yang jika ditotal terdapat 9 kursi di parlemen. Jika melihat dari komposisi partai pendukung, jelas disini bahwa Muhammad Irham lebih diuntungkan dengan banyaknya dukungan dari beberapa partai politik, akan tetapi hasil voting ternyata malah dimenangkan oleh Era Susanto dengan perolehan total suara sebanyak 14 (empat belas) suara, sedangkan rivalnya Muhammad Irham hanya memperoleh 10 (sepuluh) suara.

Fenomena kekosongan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah ini memunculkan persoalan serta dugaan adanya konteks objektivitas kepentingan politik sedari awal, dimana fenomena yang terjadi cukup unik sebab Era Susanto sebagai Wakil Bupati terpilih yang

notabene berasal dari anggota fraksi Golkar dan sebelumnya juga sebagai Ketua Komisi III di DPRD Bateng justru tidak mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partainya sendiri.

Terhambatnya proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang terjadi juga tidak terlepas dari alasan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut tidak bersifat *imperative* karena dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kedudukan seorang Wakil Kepala Daerah. Selain itu, terdapat aturan yang kurang jelas dalam mengatur batas waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah. Hal itu terlihat dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.

Keterlambatan pengisian jabatan yang terjadi ini telah menimbulkan persoalan politik seperti, gejolak sosial atau auto kritik dari parlemen, pengamat politik, serta ratusan *civil society* di Kabupaten Bangka Tengah yang melakukan aksi damai pada tanggal 26 Oktober 2023.

Tulisan ini bermaksud untuk meneliti dan menelaah pola komunikasi politik dalam fenomena pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021-2024 yang belum ditinjau berdasarkan pemilihan yang telah selesai dilakukan. Meskipun akhirnya Era Susanto resmi dilantik, namun dinamika terlambat dilantiknya Era hingga harus mengulur waktu dan mengalami kekosongan selama hampir satu tahun setelah terpilih membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan peneliti untuk menghasilkan penelitian melalui cara, upaya memperoleh, menganalisis dan menyimpulkannya data. Metode penelitian yang sesuai untuk digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu terhadap aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari hasil suatu penelitian, dengan kata lain kualitatif (*qualitative approach*) dimana merupakan mekanisme kerja penelitian deskriptif dan pengumpulan data yang kemudian dapat menganalisis suatu bentuk hasil penelitian (Ibrahim, 2015). Penelitian deskriptif mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum menyangkut berbagai fenomena sosial yang ditemukan. Selain itu juga harus mendeskripsikan hal yang sifatnya spesifik terhadap kejadian suatu realitas. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat dan juga masalah yang ada. Pendekatan kualitatif deskriptif dipahami sebagai suatu penelitian yang memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti pada persepsi, tindakan, motivasi dan lainnya secara holistic (Tohirin, 2012).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan subjek yang akan diteliti yakni mengenai penundaan pelantikan calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Terpilih yang pelantikannya terhambat hampir 1 tahun kekosongan, dengan beberapa alasan serta pertimbangan yang dilakukan peneliti, terlebih lagi fenomena kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah ini adalah yang pertama kalinya terjadi di Bangka Belitung dan menjadi salah satu faktor penguat untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penelitian ini yang menjadi informannya adalah calon kandidat atau calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah terpilih, Ketua DPRD Bangka Tengah, Partai Politik, Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah, Kassubag & analis biro hukum Provinsi Bangka Belitung, serta beberapa masyarakat terkhususnya di Bangka Tengah.

Adapun sumber data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Yang dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tak berskruktur. Menurut Sugiyono (2016:233-234) wawancara tidak berstruktur adalah wawancara adalah wawancara yang bebas dimana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dalam memperoleh data. Berkaitan dengan ini peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang sudah siap disampaikan menurut acuan.

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis untuk melihat fenomena yang diteliti. Observasi tidak hanya dilaksanakan secara langsung, akan tetapi secara umum bisa dilakukan secara tidak langsung. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bisa berbentuk dokumen sebagai sumber data contohnya tulisan, gambar, arsip, grafis, foto-foto dan sebagainya. pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik pelaksanaan kegiatan penelitian melalui adanya foto-foto ataupun dokumen sebagai bukti fisik data yang diperoleh. Dokumentasi ini digunakan agar hasil dalam penelitian ini lebih dapat dipercaya atau kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model data Miles dan Huberman. Yang mana menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan cara mereduksi data yang berarti merangkum data yang diperoleh dilapangan, memilih data yang pokok serta memfokuskan dengan hal yang berkaitan dan dianggap penting. Setelah selesai pada tahap mereduksi data, kemudian berlanjut pada langkah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, tahap ini dapat dilakukan berupa bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Tujuan dengan mendisplaykan data ini bisa memudahkan dan memahami apa yang terjadi merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dimengerti. Penarik Kesimpulan Pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pengambilan keputusan pada pertanyaan penelitian. Data yang disusun bisa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan sebagainya.

3. PEMBAHASAN

3.1. Dinamika Politik dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bahwa, dalam hal kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, Kepala Daerah mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Sesuai ketentuan tersebut proses pemilihan Wakil Bupati harus segera dilakukan. Adapun proses tahapan atau mekanisme yang harus dilalui dalam pemilihan wakil bupati kabupaten bangka tengah sisa masa jabatan 2021 – 2024 yakni seperti:

1. DPRD melakukan persiapan terkait peraturan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Bangka Tengah, Persiapan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan undang undang. Dasar hukum Pemilihan tentunya diambil berdasarkan peraturan dan tata tertib yang telah dibentuk oleh Pansus dan DPRD Kabupaten Bangka Tengah Pasal 27 Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2019.
2. Partai - partai politik yang tergabung dalam partai koalisi mengajukan nama bakal calon Wabup Bangka Tengah. Pada penentuan bakal calon ini sendiri, terdapat 3 (tiga) nama bakal calon yang di usung oleh beberapa partai, yakni Muhammad Irham yang diusung oleh Gerindra, PAN, PKB, kemudian Era Susanto yang di usung oleh Partai PPP dan Firmansyah dari PKS.
3. Partai Politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 29 draf tata tertib DPRD Bangka Tengah. Karenanya dari ketiga bakal calon tersebut dilakukanlah pemilihan dan Firmansyah tersingkirkan dari bursa pencalonan, sehingga masih tersisa 2 (dua) nama calon Wabup Bangka Tengah, yakni Muhammad Irham dan Era Susanto

4. Verifikasi berkas calon Wabup Bangka Tengah. DPRD menindak lanjuti dengan membentuk Panitia Pemilihan Wabup Bangka Tengah.
5. Penetapan calon yang memenuhi syarat. Nama yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh partai pegusung diteruskan oleh bupati dengan menyertakan surat pengantar permohonan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan proses pemilihan.
6. Pemilihan Wabup di DPRD Bangka Tengah. DPRD mengadakan rapat paripurna untuk melakukan pemilihan calon Wakil Bupati. Pemilihan dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan, seperti penyampaian visi misi oleh calon Wabup hingga proses pemungutan suara.
7. DPRD mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih sebagai Wakil Bupati. Menurut hasil pemilihan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023, Era Susanto berhasil mengalahkan rivalnya dengan total perolehan suara sebanyak 14 (empat belas) suara, sedangkan Muhammad Irham hanya memperoleh 10 (sepuluh) suara.

Meskipun telah terpilih menjadi Wakil Bupati Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021-2024, namun ia tidak bisa langsung menjabat dan bekerja sebagai Wakil Bupati, karena proses pelantikannya terhambat dan masih menunggu surat pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan. Proses lanjutan pelantikan yang tidak kunjung dilakukan ini tentunya terus mengulur waktu hingga hampir satu tahun kekosongan pada kursi Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah.

Dinamika persoalan tidak kunjung dilantiknya Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor berikut:

1. Permasalahan Administrasi

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa, ada berkas yang belum dilengkapi oleh Era selaku Wakil Bupati terpilih yakni berupa surat rekomendasi tertulis dari DPP Golkar yang harus dilengkapi dan diserahkan lagi ke Kemendagri. Tentunya hal ini ada diluar pemahaman sebelumnya, bahwa DPRD Bangka Tengah seperti yang disebutkan Me Hoa telah melaksanakan pemilihan sesuai tata tertib dan bahkan sudah terpilih, namun ternyata di akhir pihak Kemendagri membutuhkan surat rekomendasi dari DPP partai, begitu juga dengan yang disampaikan oleh Belly analis hukum Biro Hukum provinsi, bahwa memang di daerah mekanisme pelaksanaan pemilihan telah sesuai dan merasa memang tidak ada fase yang dilewati di tingkat daerah.

Namun, meskipun dikatakan memang ada kekurangan pada surat rekomendasi dari DPP partai seharusnya keterlambatan tersebut bisa langsung di proses dan segera dilengkapi kembali kekurangan surat rekomendasi DPP Golkar melalui DPD Golkar di daerah dan tidak harus sampai memakan waktu selama itu, yakni hampir satu tahun kekosongan, dan sudah dianggap tidak wajar lagi untuk alasan keterlambatan tersebut. begitupun wawancara peneliti dengan ketua pansus pemilihan Wabup Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021- 2024 Pahlivi Syahrudin dimana ketika proses pemilihan sudah dilakukan maka surat rekomendasi tidak dibutuhkan lagi, sebab secara formal syarat dan ketentuannya seperti itu, kemudian memang tidak ada sama sekali aturan yang disebutkan di tata tertib bahwa, setelah proses pemilihan berlangsung rekomendasi yang belum ada silahkan di urus kembali, tentunya hal tersebut tidak inheren dengan aturan di atasnya. Jika permasalahan tersebut ada pada rekomendasi Golkar, seharusnya tidak menjadi suatu permasalahan besar lagi, karena Era memang sudah di rekomendasikan oleh PPP, secara legalitas dia berhak menjadi calon Wakil Bupati dan ikut pemilihan.

2. Adanya Kepentingan Politik Internal Partai

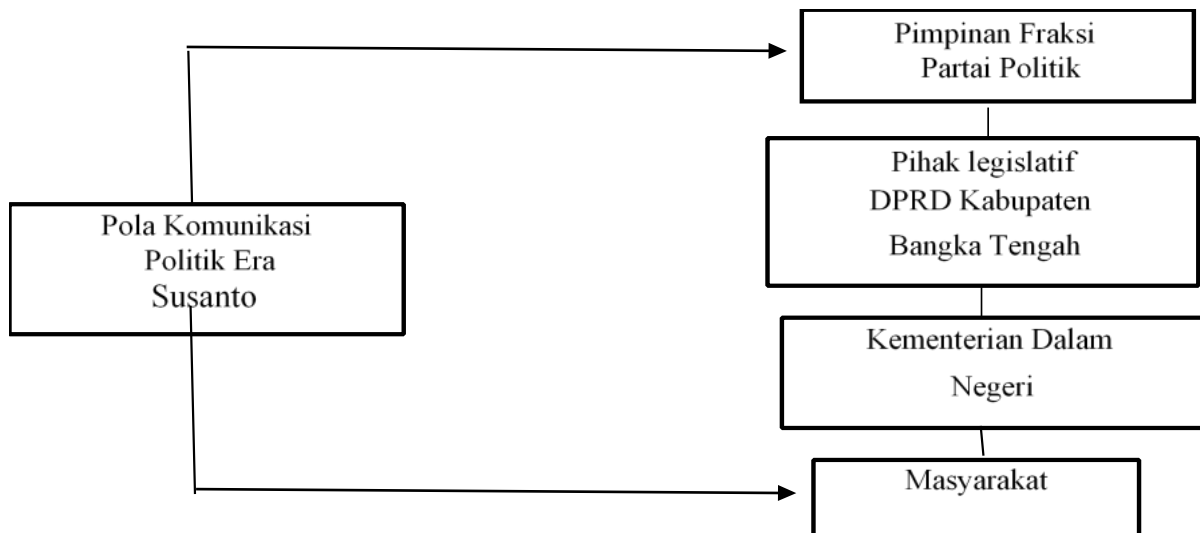
Konteks objektivitas kepentingan politik sudah dapat dilihat sedari awal, dimana Era Susanto sebagai Wakil Bupati terpilih yang notabene berasal dari anggota fraksi Golkar dan sebelumnya juga sebagai Ketua Komisi III di DPRD Batang Justu tidak mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partainya sendiri. Kemudian dugaan permasalahan kepentingan ini juga dapat dilihat dari internal koalisi pasangan (BERIMAN) Algafray Rahman dan Herry Erfian sebagai Bupati dan Wabup terpilih sebelumnya yang dimana Bupati terpilih di calonkan oleh Golkar, sedangkan Wakil Bupati oleh Nasdem. Dapat disimpulkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah terpilih saat ini berasal dari satu gerbong atau partai yang sama yakni partai Golkar. secara hukum pengusungan nama calon dari partai Golkar sah dan wajar dilakukan tidak menyalahi aturan, namun Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari satu partai yang sama terkadang juga dapat memicu konflik untuk selanjutnya, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya akan bersaing dalam Pilkada selanjutnya, hal ini juga dapat menjadi musuh bersama dimata masyarakat dan partai lain karena terkesan serakah dan ingin menguasai seluruh jabatan di pemerintahan.

3. Adanya Komunikasi Politik, Penekanan Publik & Media

Dalam mengatasi permasalahan yang ada tentunya perjuangan serta upaya pun telah banyak sekali dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu dari Era sendiri, DPRD atau parlemen bahkan gejolak sosial oleh masyarakat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPRD dan Era sendiri berbagai upaya yang telah beliau lakukan seperti melakukan komunikasi lisan, berkonsultasi dengan direktur jendral, konsultasi di kementerian, bersuara secara tersurat dan tertulis, membangun komunikasi yang baik dengan beberapa fraksi di parlemen untuk mendapatkan bantuan percepatan pelantikan. Semangat perjuangan bahkan auto kritik yang telah ditunjukkan ini tentunya telah memercik gejolak sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak Era, seperti melakukan aksi damai pada tanggal 26 Oktober 2023 di kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah untuk menuntut pemilihan Wakil Bupati terpilih Era Susanto agar segera dilantik. Selain itu ada banyak sekali komentar, opini, dan persepsi yang dilontarkan baik itu parlemen, pengamat politik maupun masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang sempat menghiiasi pemberitaan di media sosial.

4. Pola Komunikasi Politik dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Sisa Masa Jabatan 2021 – 2024

Sebagai komunikator politik, Era susanto tentunya melakukan penguatan pola komunikasi politik dalam upaya percepatan pelantikan dirinya, untuk melihat efektivitas dari komunikasi tersebut. Berikut skema pola komunikasi politik yang dilakukan Era Susanto dalam upaya pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah.



Gambar 1. Skema Pola Komunikasi Politik Era Susanto dalam Pengisian Kekosongan Jabatan

Berdasarkan gambar 1. terdapat beberapa tokoh politik hingga masyarakat dalam pola komunikasi politik Era Susanto dengan menggunakan 5 (lima) komponen komunikasi politik Nimmo dalam mempengaruhi pola komunikasi politik tersebut seperti:

1. Komunikator Politik

Era Susanto selaku komunikator politik merupakan faktor yang menentukan efektivitas dari komunikasi tersebut, untuk melihat hal itu, Richard E. Petty dan Jhon T. Cacioppo (1996) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu :

a. Kredibilitas

Era Susanto merupakan mantan ketua komisi III di DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki pengalaman dari fraksi Golkar dan menjabat di DPRD selama 2 (dua) periode. Meskipun tergolong masih muda, Wakil Bupati terpilih ini mampu membuktikan kredibilitasnya dalam urusan politik dan pemerintahan. Dimana pengalaman ini tentunya telah memberinya pemahaman mendalam tentang proses legislasi, tata kelola pemerintahan dan berkomunikasi dengan baik, sehingga memperkuat kredibilitas atau kepercayaannya untuk memimpin.

b. Daya Tarik

Daya tarik Era Susanto tentunya terletak pada sifat pribadi, keakraban, kinerja dan keterampilan berkomunikasi. Dibuktikan dengan dirinya yang mempunyai jaringan yang luas di Jakarta terutama melalui Bikers Brotherhood MC Indonesia dan Pemuda Muhammadiyah yang memberinya akses ke beberapa fraksi di parlemen dalam proses pemilihan atau voting yang tentunya sangat berpengaruh besar dalam menentukan kemenangannya dalam pemilihan Wabup Bangka Tengah. Dibuktikan Era di usung oleh partai lain yakni PPP bukan dari partainya sendiri Golkar,

c. Kesamaan

Hubungan baik yang dibangun oleh komunikator dengan tokoh-tokoh lokal, fraksi di DPRD serta masyarakat, telah menunjukkan bahwa adanya kesamaan dalam kebutuhan, harapan, dan perasaan. Dibuktikan dengan dukungan dari DPW Nasdem, dan rekomendasi dari PPP di awal pencalonan pemilihan Wabup Bangka Tengah yang menunjukkan kesamaan visi politik dengan partai – partai dan kelompok lainnya, dengan kesamaan ini, mereka percaya dan yakin untuk menyalurkan aspirasi partai mereka kepada masyarakat melalui tangan Era.

d. Kekuasaan

Dukungan dari beberapa fraksi di DPRD, memberinya kekuatan politik yang signifikan dalam pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Era yang merupakan anak dari Bujang Alok Alok yang merupakan tokoh masyarakat Desa Perlang, sehingga dalam konteks penundaan pelantikan kemarin, masyarakat sampai melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Bangka Tengah untuk menuntut percepatan pelantikan Wakil Bupati.

Pada proses opini publik dan pemerintah. dalam proses dan upaya percepatan pelantikan Wabup Kabupaten Bangka Tengah ini, Dan Nimmo (2008) mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik. *Pertama*, Politikus, merupakan seorang yang terlibat dalam politik dan berperan sebagai ahli politik dan figur pada pemerintahan. Politikus juga menjadi penyalur informasi dan menyerap aspirasi masyarakat kepada pemerintah begitupun sebaliknya. Maka dalam komunikator politik ini, terdapat Era selaku komunikator politik memanfaatkan keterampilannya dalam berkomunikasi, baik itu cara komunikator meyakinkan komunikan, cara lobi politiknya serta menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak menjadi point penting terutama dalam memperoleh kekuasaan. Selanjutnya yaitu Me Hoa selaku pihak legislatif atau ketua dprd

bangka tengah dengan berbagai upaya terkait penundaan pelantikan yang terjadi, seperti dalam wawancaranya yakni, adanya komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tak langsung. Sebagai upaya dan tanggung jawabnya sebagai politisi atau pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

Kedua, Profesional, komunikator profesional merupakan peranan sosial yang relatif baru, yaitu hasil sampingan dari revolusi komunikasi, yaitu munculnya media massa dan perkembangan media komunikator, hal ini menjadi penting terutama pada proses komunikasi politik dalam pembentukan opini publik. Yakni terdapat pengamat politik yang menyampaikan auto kritiknya di berbagai media berita, salah satunya analis pemerintahan atau birokrasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Huzarni Rani selaku tokoh pengamat pemerintah dan birokrasi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam wawancaranya di media menyebutkan adanya pihak yang sengaja mempengaruhi keterlambatan ini dan tidak ada alasan untuk tidak segera dilantik, sebab keterlambatan ini dapat memicu terjadinya konflik di daerah, selanjutnya juga terdapat opini di media oleh pengamat politik Pal Gunadi yang ikut mengomentari terkait penundaan pelantikan yang terjadi.

Ketiga, aktivis, merupakan komunikator politik utama yang bertindak sebagai organisasional dan interpersonal. Biasanya aktivis mempengaruhi keputusan orang lain atau meyakinkan orang dengan cara berpikir, dan meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat. Dalam persoalan ini, terdapat ratusan masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau aksi damai pada tanggal 26 oktober 2023 di kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah untuk menuntut percepatan pelantikan.

2. Pesan Politik

Pesan politik oleh Era Susanto yaitu pesan yang berkaitan dengan informasi terkait terhambatnya proses pelantikan yang disebabkan adanya kekurangan pada salah satu berkas rekomendasi dari DPP partai pengusung, dalam menyempurnakan pola komunikasi politik tersebut, terdapat pesan politik yang terdiri 3 (tiga) jenis pesan politik yakni: propaganda, periklanan, dan retrorika (Nimmo 2008)

- a) Retorika, merupakan penggunaan seni bahasa untuk berkomunikasi secara persuasif dan efektif, dengan komunikasi dua arah untuk mempengaruhi lawan bicara dan menyamakan persepsi komunikator. Sehingga dalam hal ini, Era Susanto

membangun komunikasi yang baik, adanya lobi politik baik kepada pimpinan politik daerah maupun parlemen di DPRD, sopan, serta attitude atau tatakkrama menjadi point utama untuk Era, sehingga pada akhirnya Era Susanto berhasil menjalankan pesan politik retorika ini dibuktikan dengan terpilihnya Era Susanto dan berhasil mengungguli rivalnya sebanyak 4 (empat) suara dari 24 (dua puluh empat) suara yang ikut dalam voting pemilihan Wabup Bangka Tengah.

- b) Iklan Politik, menjadi alat yang penting untuk menjaga dukungan dan membangun citra positif namun juga dapat berdampak negatif, dengan banyaknya iklan seperti pemberitaan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan seperti parlemen, pengamat politik dll terkait penundaan pelantikan memposisikan Era pada kondisi terzolimi sebab haknya yang cukup lama di abaikan, dan banyak politisi yang mengomentari terkait proses pemerintahan di daerah yang dirasa timpang serta mempertanyakan terkait lamanya pelantikan, namun dengan iklan pemberitaan ini banyak juga yang mencari - cari kesalahan bahkan persepsi negatif antar internal partai mulai bermunculan, berusaha mengulik dan menyampaikan informasi yang tidak benar dan merugikan Era.
- c) Propaganda, merupakan salah satu komunikasi yang disampaikan secara terus menerus agar terciptanya opini publik yang baru dan lebih kuat, sehingga komunikasi dapat dikendalikan oleh komunikator dengan pemberitaannya, oleh karena itu Era Susanto selaku Wakil Bupati terpilih lebih mudah untuk mempengaruhi komunikasi atau fraksi di parlemen dengan cara melakukan strategi dengan pesan pesan yang disampaikannya terkait dengan proses awal pemilihan, voting hingga berhasil dilantik meskipun sempat kosong cukup lama setelah terpilih, dengan melalui berbagai cara agar dapat tersampaikan dan diwujudkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterikatan politik antara fraksi PPP dengan Nasdem yang berhasil ia dapatkan untuk sebagai syarat awal rekomendasi.

3. Media Komunikasi Politik

Media dalam komunikasi politik yang digunakan oleh Era Susanto dalam proses percepatan pelantikan yaitu dengan dua jenis media, yakni secara langsung dan tidak langsung. Adapun media langsung yang digunakan oleh Era Susanto merupakan media utama baginya dalam menyampaikan sebuah pesan politik, seperti dalam wawancara peneliti dengan Era Susanto dimana telah ia usahakan semaksimal mungkin, mulai dari

menemui pimpinan partai di daerah dan fraksi di parlemen, bahkan sampai mendatangi pihak Kemendagri langsung untuk memperjelas kondisi penundaan pelantikan dirinya, yang mana ia akui proses pemilihan berjalan lancar di daerah dan meskipun ada proses yang harus dijalankan pemerintah, namun hal tersebut telah memakan waktu yang cukup lama.

Kemudian media tidak langsung digunakan Era Susanto sebagai media tambahan dalam proses percepatan pelantikannya seperti media telekomunikasi dengan pihak pihak terkait, sekaligus menginformasikan persoalan yang tengah terjadi baik kepada pemerintah dan masyarakat baik itu di daerah, maupun provinsi dan pusat. Hal ini juga bisa menarik perhatian berbagai pihak yang turut ikut membantu memberikan opini dan penekanan – penenkanan untuk percepatan pelantikan.

4. Khalayak Politik

Peran komunikan yaitu memberikan sebuah respon berupa aspirasi terkait dengan permasalahan individu seseorang khalayak kepada komunikator. Pesan yang telah disampaikan secara langsung dan tak langsung oleh Era Susanto baik itu dari parlemen, pengamat politik, dan civil society di Kabupaten Bangka Tengah, oleh sebab itu respon atau timbal balik yang dilakukan antara komunikator dengan komunikan pun terjadi, seperti tepat pada tanggal 26 Oktober 2023 ratusan masyarakat Bangka Tengah melakukan aksi damai di depan kantor Bupati untuk mendesak pelantikan Era Susanto segera.

5. Efek Politik

Berdasarkan gambar 1. Pada skema pola komunikasi politik yang telah dilakukan dengan berbagai tokoh politik hingga masyarakat ini telah memaparkan terkait komunikasi politik yang di upayakan untuk mencapai tujuan yang di inginkan, sebagaimana pada komponen terakhir Efek komunikasi politik ini merupakan dampak yang di ikuti dari beragam bentuk, isi pesan komunikasi politik yang di transformasikan dalam interaksi komunikasi politik. Karenanya efek politik yang terjadi pada pola komunikasi Era Susanto yakni dibuktikan dengan keberhasilannya mencapai tujuan yakni resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021- 2024.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Komunikasi Politik dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Sisa Masa Jabatan 2021 - 2024 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, adanya kepentingan politik internal sedari awal, sebab faktor utama keterlambatan pelantikan dikarenakan kekurangan pada salah satu berkas rekomendasi dari DPP partai internal yakni partai Golkar. Sehingga terjadilah tarik menarik kepentingan; Kedua, era memiliki fondasi yang kokoh dalam pola komunikasi politik, dengan kredibilitas yang kuat, daya tarik yang mempengaruhi, kesamaan dengan masyarakat lokal, kekuasaan yang didukung oleh dukungan politik dari berbagai pihak serta akses ke jaringan kekuasaan yang luas. Semua ini membentuk gambaran yang kuat tentang potensi keberhasilan pola komunikasinya dalam membangun dukungan dan menjalankan kepemimpinannya secara efektif; Ketiga, pola komunikasi politik yang dilakukan dalam menentukan efektivitas komunikasi yaitu, komunikator politik dengan melihat kredibilitas, daya tarik, kesamaan dan kekuasaan, selanjutnya pesan politik dengan retorika, iklan politik dan propaganda, kemudian media komunikasi politik yang dilakukan secara langsung dan tak langsung, adanya khalayak politik yang memberikan respon terkait permasalahan yang terjadi seperti aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat, pemberitaan media, seperti opini, persepsi oleh pengamat politik dan parlemen, terakhir efek politik sebagai dampak yang terjadi yakni dengan dilantiknnya Era Susanto secara resmi sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah sisa masa jabatan 2021-2024.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini.

6. Pernyataan Conflicting Interests

Peneliti menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepengarangan, dan publikasi artikel ini.

References

- Djuyandi, Y.,(2017). Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto Dalam Pemilihan Ketua DPRD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 20162021. *Jurnal Wacana Politik* , Volume 2 No 1, 18-20.
- Hoveland, C., 1971. Social Communication. Proceeding of the American Philosophical Society. *Dalam Pokok-Pokok Dasar Ilmu Publisistik oleh Drs. R. Roekomy.* , Volume 9.
- Ibrahim, (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak:Perpustakaan Nasional.
- Inews.id, (2023). *PAW Wabup Tak Kunjung Dilantik, Ratusan Warga Geruduk Kantor Bupati Bangka Tengah*. [Halaman WEB]. Diakses pada tanggal 26 oktober 2023, dari <https://www.inews.id/apps>
- Kelibay, I., Boinauw, I., R. & Kalagison, M. D., 2022. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken* , Volume 7.
- Khalik, N. P., Rembang, M. & Tulung, L., (2018). Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Tombulu Minahasa. *Jurnal UNSRAT*, Volume 4.
- Mukhtar, (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nimmo, D., (2008). *Komunikasi Politik: Komunikator. Pesan, dan Media*, Edisi Terjemahan oleh Tjun Sujarman. Bandung : Remaja Rosdakarya, 30.
- Nimmo, D., (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan media*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 42.
- Nimmo, D.,(2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Media, dan Pesan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Portal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, (2023). *Ungguli rivalnya era susanto duduki posisi wakil bupati bangka tengah*. [Halaman WEB]. Diakses pada tanggal 20 maret 2023, dari <https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/ungguli-rivalnya-erasusanto-duduki-posisi-wakil-bupati-bangka-tengah>
- Prastowo, A., (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Richard E. Petty and Jhon T. Cacioppo, (1996). *Attitudes and Persuasion:Classic and Contemporary Approaches*, Colorado: Westview Press, Inc, 412
- Soermarno, A., (2004). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tohirin, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan*.

Tentang Penulis

Elsa Madina, Saat ini penulis sebagai Mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Ibrahim, Saat ini penulis sebagai Dosen Universitas Bangka Belitung.

Novendra Hidayat, Saat ini penulis sebagai Dosen Universitas Bangka Belitung.